



Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Seberang Palinggam, Kota Padang

Outreach on the Use of Direct Cash Assistance (BLT) to Empower LowIncome Communities in Seberang Palinggam Subdistrict, Padang City

Chelsea Defista^{1*}, Fadilah Permata Yora², Diva Nurfadhilah³, Huriyatul Husna⁴, Yulia Hanoselina⁵

Universitas Negeri Padang

Email: Chelseadfsta@gmail.com^{1*}, fadilahpermatayora@gmail.com², divanurfadhilah345@gmail.com³, huriyatulhusna0600@gmail.com⁴, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 13-06-2026

Revised : 15-06-2026

Accepted : 17-06-2026

Published : 19-06-2026

Abstract

Poverty remains a serious challenge in Indonesia's national development, including in Seberang Palinggam Village, South Padang District, Padang City, which has been designated as one of the 23 slum settlement points in Padang City. The majority of its residents work as fishermen, port laborers, and small traders with unstable incomes, making them one of the most in need of social protection program interventions. This article aims to describe and analyze the implementation of socialization on the utilization of the People's Welfare Direct Cash Assistance (BLT Kesra) as an effort to empower the underprivileged community in the village. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained thru observation, interactive discussions, documentation, and relevant literature studies. The research results show that before the socialization activities were carried out, the community's understanding of the objectives, distribution mechanisms, and utilization of the Kesra BLT was still limited. After the socialization was conducted in a participatory and communicative manner, the community's understanding increased, especially regarding the targeted, productive, and responsible use of the assistance. The socialization also succeeded in raising awareness that the BLT Kesra not only functions as short-term consumptive aid but also as a first step toward the economic independence of the community. However, the effectiveness of the program still faces challenges such as inaccuracies in recipient data and the lack of ongoing support. Therefore, socialization needs to be carried out periodically and integrated with skills training programs and business mentoring to create a more sustainable empowerment impact.

Keywords : *Direct Cash Assistance, Poverty, Community Empowerment*

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia, termasuk di Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, yang ditetapkan sebagai salah satu dari 23 titik permukiman kumuh di Kota Padang. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil dengan penghasilan tidak tetap, menjadikannya salah satu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi program perlindungan sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu di kelurahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui



observasi, diskusi interaktif, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme penyaluran, dan pemanfaatan BLT Kesra masih terbatas. Setelah sosialisasi dilakukan secara partisipatif dan komunikatif, pemahaman masyarakat meningkat, terutama terkait pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran, produktif, dan bertanggung jawab. Sosialisasi juga mampu membangun kesadaran bahwa BLT Kesra tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi tantangan berupa ketidaktepatan data penerima dan belum adanya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilaksanakan secara berkala dan diintegrasikan dengan program pelatihan keterampilan serta pendampingan usaha guna menciptakan dampak pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci : *Bantuan Langsung Tunai, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosialisasi*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara berkesinambungan, kondisi kesenjangan sosial-ekonomi antarmasyarakat belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen dengan jumlah absolut mencapai 24,06 juta jiwa, menurun 1,84 juta jiwa dibandingkan posisi Maret 2023 (BPS, 2025). Walaupun tren penurunan ini patut diapresiasi, angka tersebut masih mencerminkan besarnya beban sosial yang harus ditanggung pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Fenomena kemiskinan perkotaan menunjukkan karakteristik tersendiri yang tidak dapat diabaikan, di mana pada periode yang sama persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 6,66 persen atau setara dengan 11,05 juta jiwa (BPS, 2025). Tingginya arus urbanisasi yang tidak diimbangi penyerapan tenaga kerja yang memadai, keterbatasan akses perumahan layak, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi faktor utama yang memperparah kemiskinan di kawasan perkotaan.

Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Padang sebagai ibukota provinsi, tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada September 2024 mencapai 5,42 persen atau sebanyak 315,43 ribu jiwa, dengan persentase kemiskinan perkotaan sebesar 4,16 persen (BPS Sumatera Barat, 2025). Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional menghadapi paradoks urbanisasi: di tengah kemajuan ekonomi kota, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di kawasan permukiman padat dan kumuh. Kelurahan Seberang Palinggam yang terletak di Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan realitas tersebut, ditetapkan sebagai salah satu dari 23 titik permukiman kumuh di Kota Padang berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014 (Elviyanti, 2018). Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil dengan penghasilan tidak tetap, tinggal di permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai dan lereng perbukitan, sehingga rentan terhadap bencana sekaligus rentan secara ekonomi.

Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya yang paling dikenal adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT merupakan instrumen kebijakan berupa pemberian uang tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan, baik yang bersifat kondisional maupun tidak bersyarat, dengan tujuan menjaga daya



beli masyarakat prasejahtera serta memperkuat sistem jaminan sosial nasional (Hastuti et al., 2021). Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang lebih luas, BLT tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi jangka pendek, tetapi juga diharapkan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021).

Meskipun program BLT memiliki landasan kebijakan yang kuat dan telah menunjukkan dampak positif, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala. Pertama, masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat pemutakhiran data yang belum optimal (Kemensos, 2024). Kedua, pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program masih minim akibat kurangnya sosialisasi di tingkat kelurahan (Hadi et al., 2025). Ketiga, pola pemanfaatan dana yang cenderung habis untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, terbatasnya koordinasi antarinstansi dalam perencanaan dan pengawasan penyaluran BLT sehingga menimbulkan celah dalam akuntabilitas program (Sa'adah et al., 2023 dalam penelitian BLT Surabaya, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan program BLT tidak semata-mata ditentukan oleh besaran bantuan yang disalurkan, melainkan juga oleh kualitas komunikasi dan pendampingan yang menyertainya.

Bertolak dari permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi menjadi elemen yang sangat krusial dalam implementasi program BLT. Sosialisasi bukan sekadar kegiatan penyebaran informasi administratif, melainkan wahana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran dalam memanfaatkan bantuan secara bijak dan produktif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang menekankan bahwa program bantuan sosial semestinya tidak hanya berperan sebagai penyangga ekonomi sesaat, melainkan juga sebagai pijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi jangka panjang. Pemerintah memiliki peluang strategis untuk mengintegrasikan BLT dengan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta akses permodalan usaha kecil guna menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan bagi penerima manfaat (Kompasiana, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan sosialisasi pemanfaatan BLT sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Seberang Palinggam, Kota Padang. Secara lebih spesifik, artikel ini mengkaji: (1) bentuk dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi BLT di kelurahan tersebut; (2) tingkat pemahaman dan respons masyarakat penerima manfaat setelah mengikuti sosialisasi; serta (3) relevansi dan dampak sosialisasi dalam mendorong pemanfaatan BLT secara produktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah kelurahan, pemerintah kota, maupun pemangku kepentingan lain dalam merancang program sosialisasi dan pemberdayaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra di Kelurahan Seberang Palinggam, Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pengalaman masyarakat terhadap program BLT secara mendalam (Moleong, 2018). Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis proses sosialisasi, tingkat



pemahaman masyarakat, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku dalam memanfaatkan bantuan (Sugiyono, 2019). Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih agar hasil analisis dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan secara komprehensif.

Jenis kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi partisipatif, di mana penulis terlibat langsung dalam penyampaian informasi mengenai BLT Kesra kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi partisipatif terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, dalam memahami dan mengoptimalkan program bantuan sosial pemerintah (Kambali, Nasrulloh, & Ulum, 2022). Melalui pendekatan ini, penulis berperan sekaligus sebagai penyampai informasi dan fasilitator diskusi. Keterlibatan langsung tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan secara tepat dan produktif.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan diskusi interaktif bersama masyarakat penerima manfaat, pihak kelurahan, serta tokoh masyarakat. Data sekunder bersumber dari dokumentasi kegiatan, laporan penyaluran BLT Kelurahan Seberang Palinggam, dan literatur ilmiah yang relevan. Penggunaan dua jenis sumber data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan valid mengenai pelaksanaan program di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan program perlindungan sosial memerlukan implementasi yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang paling rentan. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat miskin adalah melalui Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diluncurkan pada Oktober 2025. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, melainkan juga oleh pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan pemanfaatan bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang efektif agar BLT Kesra dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini mengkaji pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan BLT Kesra di Kelurahan Seberang Palinggam, Kota Padang, beserta capaian dan tantangan yang dihadapi.

Pengertian dan Dasar Hukum BLT Kesra

Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) merupakan program bantuan sosial yang secara resmi diluncurkan pada 17 Oktober 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemunculan program ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk memperkuat arsitektur perlindungan sosial nasional yang dinilai masih memiliki celah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah struktur sosial-ekonomi. Program ini dirancang sebagai bantalan sosial tambahan (buffer) guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca tekanan inflasi pangan yang berlangsung sejak pertengahan 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025).



Secara konseptual, BLT Kesra termasuk dalam kategori unconditional cash transfer atau bantuan tunai tanpa syarat. Model intervensi ini menempatkan penerima manfaat sebagai subjek yang memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan prioritas penggunaan bantuan sesuai kebutuhan terpenting keluarga mereka. Berbeda dengan model conditional cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu seperti menyekolahkan anak atau memeriksakan kesehatan secara rutin, BLT Kesra memberikan keleluasaan bagi penerima untuk mengalokasikan dana sesuai kondisi riil yang mereka hadapi (Iuwastangguh, 2026). Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penyerapan dan fleksibilitas penggunaan, meskipun di sisi lain menuntut mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar dana tidak digunakan secara kontraproduktif.

Dalam literatur ilmu kesejahteraan sosial dan ekonomi pembangunan, program unconditional cash transfer telah terbukti efektif dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, serta mendorong investasi pada pendidikan dan kesehatan anak-anak dalam keluarga penerima manfaat (World Bank, 2018). Namun demikian, para akademisi juga menekankan bahwa efektivitas program semacam ini sangat bergantung pada seberapa baik sistem pendataan penerima manfaat dikelola, seberapa tepat sasaran bantuan tersalurkan, dan seberapa kuat ekosistem program pemberdayaan yang menyertainya (Banerjee & Duflo, 2019). Dengan demikian, keberhasilan BLT Kesra tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaksanaan seluruh komponen program, termasuk sosialisasi sebagai ujung tombak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Landasan hukum program BLT Kesra bersandar pada sejumlah regulasi utama yang saling melengkapi dan membentuk kerangka normatif yang solid. Regulasi-regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjadi payung hukum paling mendasar bagi seluruh program perlindungan sosial di Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur secara spesifik mekanisme intervensi bagi kelompok masyarakat paling miskin; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memberikan mandat eksplisit kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengakselerasi program-program perlindungan sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis DTSEN yang menjadi pedoman teknis dalam penetapan sasaran penerima; serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 239/HUK/2025 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat yang mengatur secara operasional mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana (Kemensos RI, 2025).

Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi pedoman teknis yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Sosial di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga aparat kelurahan dan desa yang berada di garis terdepan implementasi. Keberadaan landasan hukum yang komprehensif ini menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya program bantuan sosial yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga akuntabel secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemangku kepentingan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.



BLT Kesra dalam Kerangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BLT Kesra tidak dapat dan tidak seharusnya dipahami sebagai solusi tunggal atau permanen atas persoalan kemiskinan struktural yang telah berakar dalam sistem sosial-ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Program ini lebih tepat dipandang sebagai penopang sementara yang memberikan ruang nafas bagi masyarakat untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, sambil secara bertahap membangun kapasitas mereka untuk bangkit menuju kemandirian. Perspektif ini penting untuk ditanamkan sejak awal agar program tidak menciptakan budaya ketergantungan yang kontraproduktif terhadap cita-cita pemberdayaan masyarakat jangka panjang.

Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi, program ini menjalankan dua fungsi utama yang saling melengkapi. Fungsi pertama adalah sebagai "penebalan" atau penguatan bagi penerima bantuan reguler seperti PKH dan BPNT, di mana BLT Kesra hadir sebagai lapisan perlindungan tambahan yang mampu menutup celah kebutuhan yang tidak tertangani oleh program-program yang sudah ada. Fungsi kedua adalah sebagai instrumen penjangkauan baru untuk keluarga yang sebelumnya sama sekali belum tersentuh oleh program perlindungan sosial pemerintah, baik karena keterbatasan data maupun karena kondisi mereka berada di ambang batas kelayakan yang kerap tidak terdeteksi oleh sistem pendataan konvensional (Balai Desa Kemiri, 2025). Kedua fungsi ini menjadikan BLT Kesra sebagai komponen yang melengkapi dan memperkuat arsitektur perlindungan sosial nasional secara keseluruhan.

Lebih jauh, Setiawan dan Jamaliah (2023) dalam kajian mereka tentang evaluasi program bantuan sosial di Indonesia menekankan bahwa tanpa disertai program pemberdayaan yang komprehensif dan terintegrasi seperti pelatihan keterampilan vokasional, akses permodalan usaha mikro, dan pendampingan kewirausahaan bantuan tunai berisiko besar habis untuk kebutuhan konsumsi semata tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Fenomena ini sering disebut sebagai "efek konsumtif" dari program bantuan sosial, di mana bantuan yang diterima langsung diserap habis oleh kebutuhan sehari-hari tanpa menyisakan nilai tambah ekonomi yang dapat memperbaiki posisi tawar keluarga penerima dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peluang strategis yang sangat besar untuk mengintegrasikan BLT Kesra dengan program-program pemberdayaan yang lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang. Salah satu contoh nyata dari upaya integrasi semacam ini adalah Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. PENA dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan bantuan tunai dengan pemberdayaan ekonomi produktif, khususnya bagi KPM yang berada pada usia produktif dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mandiri (Blog Amikom, 2026). Melalui program ini, penerima BLT Kesra didorong untuk tidak hanya menggunakan bantuan sebagai dana konsumsi, tetapi juga sebagai modal awal untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan.

Dalam konteks spesifik Kelurahan Seberang Palinggam, potensi integrasi antara BLT Kesra dan program pemberdayaan ekonomi sangat menjanjikan. Mayoritas warga kelurahan ini bergerak di sektor informal sebagai nelayan tangkap, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil yang memiliki keterampilan teknis di bidangnya masing-masing, namun kerap terkendala oleh keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Dengan modal awal yang bersumber dari BLT Kesra, ditambah dengan pendampingan teknis yang tepat sasaran dan akses terhadap jaringan pemasaran yang lebih



luas, warga kelurahan ini memiliki kapasitas riil untuk meningkatkan skala usaha mereka dan pada akhirnya lepas dari jerat kemiskinan secara lebih permanen. Inilah mengapa sosialisasi yang tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga menanamkan paradigma kemandirian ekonomi, menjadi komponen yang tidak kalah pentingnya dari penyaluran bantuan itu sendiri.

Pelaksanaan Sosialisasi BLT Kesra di Kelurahan Seberang Palinggam

Kegiatan sosialisasi BLT Kesra di Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penerima informasi, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pemahaman dan pemanfaatan program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Kelurahan Seberang Palinggam sendiri memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang menjadikannya salah satu wilayah paling relevan untuk dijadikan lokus sosialisasi program perlindungan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014, kelurahan ini ditetapkan sebagai salah satu dari 23 titik permukiman kumuh di Kota Padang (Elviyanti, 2018). Kondisi fisik permukiman yang padat dan terbatas mencerminkan tingkat kesejahteraan warga yang pada umumnya masih berada pada kategori rendah hingga menengah ke bawah. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan tangkap, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil yang memiliki karakteristik penghasilan tidak tetap dan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi musiman maupun perubahan kondisi pasar yang tidak terduga. Kerentanan ganda baik dari sisi penghasilan yang tidak menentu maupun dari sisi akses terbatas terhadap layanan sosial dasar menjadikan Kelurahan Seberang Palinggam sebagai salah satu lokus yang paling membutuhkan intervensi sosialisasi program perlindungan sosial secara intensif dan berkelanjutan.

Dalam mendesain kegiatan sosialisasi, tim pelaksana mempertimbangkan secara cermat kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Sosialisasi tidak dirancang sebagai acara formal satu arah yang kaku dan berjarak, melainkan sebagai wahana edukasi dan pemberdayaan yang hangat, inklusif, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta. Kristanto et al. (2024) dalam penelitiannya tentang efektivitas sosialisasi program bantuan sosial di Indonesia menegaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang bersifat partisipatif merupakan upaya yang sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu mengakses dan memanfaatkan secara optimal bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Lebih jauh, penelitian tersebut menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan dialogis dan berbasis pada konteks lokal terbukti menghasilkan tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sosialisasi yang bersifat instruktif dan seremonial.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, kegiatan sosialisasi ini mencakup lima fokus utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang koheren. Kelima fokus tersebut meliputi: peningkatan pemahaman masyarakat tentang program BLT Kesra secara menyeluruh, penjelasan tentang peran dan manfaat program dalam kehidupan ekonomi keluarga, pemberian panduan pemanfaatan dana yang tepat sasaran dan bertanggung jawab, penanaman kesadaran tentang BLT Kesra sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi, serta pembukaan ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pertanyaan



secara langsung. Kelima fokus ini menjadi panduan yang menstrukturkan seluruh rangkaian pelaksanaan sosialisasi dari awal hingga akhir.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Program BLT Kesra

Salah satu temuan paling krusial yang teridentifikasi pada awal pelaksanaan sosialisasi adalah kondisi pemahaman awal masyarakat yang masih sangat terbatas mengenai program BLT Kesra. Keterbatasan pemahaman ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, melainkan lebih banyak disebabkan oleh minimnya upaya diseminasi informasi yang terstruktur dari pihak pemerintah kelurahan dan instansi terkait sebelum sosialisasi dilaksanakan. Banyak peserta yang hadir mengaku baru pertama kali mendengar penjelasan yang komprehensif dan sistematis mengenai program ini, meskipun mereka telah mendengar berita tentang BLT Kesra melalui media sosial dan percakapan informal di lingkungan mereka.

Keterbatasan pemahaman ini termanifestasi dalam beberapa bentuk yang cukup spesifik. Pertama, banyak peserta yang tidak mengetahui secara pasti kriteria kelayakan untuk menjadi penerima manfaat, sehingga menimbulkan kekeliruan persepsi bahwa setiap warga miskin secara otomatis akan menerima bantuan tanpa perlu melalui proses pendataan. Kedua, sebagian besar peserta belum memahami perbedaan mendasar antara BLT Kesra dengan program bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT, yang seringkali disamakan atau bahkan dianggap sebagai satu program yang sama. Ketiga, mekanisme teknis pencairan bantuan baik melalui rekening bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia belum dipahami secara memadai oleh mayoritas peserta, sehingga menimbulkan kebingungan tentang langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan setelah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Kondisi ini mencerminkan temuan berbagai kajian evaluasi yang secara konsisten menemukan bahwa kurangnya sosialisasi di tingkat kelurahan atau desa menjadi salah satu hambatan utama efektivitas program bantuan sosial di Indonesia (Hadi et al., 2025; Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 2024).

Selain itu, fenomena infodemi atau banjir informasi yang tidak akurat di media sosial turut memperburuk kondisi pemahaman masyarakat. Berbagai kabar yang menyesatkan tentang siapa yang berhak menerima bantuan, berapa nominalnya, dan bagaimana cara mendaftar beredar luas di berbagai platform media sosial, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran dikalangan warga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan. Sosialisasi yang terstruktur dan berbasis fakta menjadi antidot yang penting untuk menangkal dampak negatif dari informasi yang tidak akurat tersebut. Iuwastangguh (2026) dalam kajiannya tentang literasi program bantuan sosial di Indonesia menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang suatu program merupakan fondasi penting yang melindungi masyarakat dari pengaruh informasi menyesatkan yang dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri.

Setelah mengikuti seluruh sesi sosialisasi, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dan terukur dalam berbagai aspek. Peserta mulai memahami dengan jelas bahwa BLT Kesra adalah program baru yang dirancang dengan karakteristik dan mekanisme yang berbeda dari bantuan-bantuan reguler yang pernah mereka terima sebelumnya. Mereka juga mulai memahami bahwa program ini bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tetap yang diandalkan dalam jangka panjang. Lebih dari itu, peserta mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dan kelengkapan data yang mereka berikan kepada petugas pendataan, karena akurasi data dalam sistem DTSEN sangat menentukan siapa yang akhirnya berhak menerima



manfaat dari program ini. Peningkatan pemahaman yang terukur ini sejalan dengan hasil kajian yang menyatakan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan kualitas pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat (Jurnal Multidisiplin Inovatif, 2026). Pemahaman yang lebih baik juga berdampak langsung pada berkurangnya potensi miskomunikasi, kecemburuan sosial, dan konflik horizontal yang kerap terjadi di masyarakat akibat ketidaktahuan warga tentang mekanisme seleksi dan penetapan penerima manfaat.

Mendorong Pemanfaatan Dana yang Tepat Sasaran dan Bertanggung Jawab

Salah satu aspek paling strategis sekaligus paling menentukan keberhasilan jangka panjang dari sosialisasi BLT Kesra adalah penyampaian panduan yang konkret dan praktis tentang bagaimana dana bantuan seharusnya dimanfaatkan secara tepat sasaran dan penuh tanggung jawab. Aspek ini menjadi sangat penting mengingat salah satu kritik paling berulang yang kerap ditujukan kepada program bantuan tunai di Indonesia adalah kecenderungan dana habis digunakan untuk keperluan konsumsi jangka pendek tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang bermakna bagi perbaikan kondisi keluarga penerima dalam jangka menengah dan panjang (Kompasiana, 2025).

Dalam sesi sosialisasi, peserta diberikan arahan yang bersifat praktis dan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga mereka. Pertama, masyarakat didorong untuk terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dari dana yang diterima, termasuk kebutuhan pangan bergizi, biaya pendidikan anak, dan biaya pemeriksaan kesehatan yang telah lama tertunda. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar ini penting untuk memastikan bahwa fungsi utama bantuan sebagai penopang konsumsi minimal keluarga dapat terpenuhi sebelum dana dialokasikan untuk keperluan lain. Kedua, peserta didorong untuk mengalokasikan sebagian dana bahkan sekalipun dalam jumlah kecil sebagai modal usaha mikro yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Contoh-contoh usaha yang relevan dengan konteks Kelurahan Seberang Palinggam disampaikan secara spesifik, seperti berjualan lauk matang berbahan hasil laut, membuka warung kebutuhan rumah tangga berskala kecil, atau mengembangkan kerajinan tangan berbahan baku lokal yang memiliki nilai jual. Ketiga, masyarakat diingatkan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara bijak dengan menghindari pengeluaran impulsif untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti pembelian barang-barang mewah yang tidak esensial atau kegiatan hiburan yang boros.

Arahan-arahan praktis tersebut bukan disampaikan dalam bentuk larangan yang kaku dan menghakimi, melainkan dalam semangat edukasi yang empatik dan menghargai otonomi penerima manfaat sebagai individu dewasa yang mampu membuat keputusan yang rasional apabila diberikan informasi yang memadai. Pendekatan ini penting untuk menjaga martabat penerima manfaat dan menghindari stigmatisasi yang seringkali menyertai program bantuan sosial, di mana penerima bantuan dipandang sebagai pihak yang tidak mampu mengambil keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Setiawan dan Jamaliah (2023) menekankan bahwa program bantuan sosial yang disertai dengan edukasi keuangan yang berkualitas dan berbasis pada penghargaan terhadap kapasitas penerima manfaat terbukti menghasilkan pola penggunaan bantuan yang lebih produktif dibandingkan dengan program yang sekadar menyalurkan uang tanpa pendampingan.

Aspek pertanggungjawaban sosial juga mendapat penekanan yang signifikan dalam sesi sosialisasi. Peserta diingatkan tentang pentingnya kejujuran dalam melaporkan kondisi ekonomi



keluarga kepada petugas pendataan, agar bantuan dapat tersalurkan kepada mereka yang benar benar membutuhkan. Lebih dari itu, masyarakat diajak untuk memiliki rasa kepemilikan kolektif terhadap program ini, di mana setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab moral untuk turut memastikan bahwa bantuan negara digunakan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama. Penekanan nilai kejujuran dan tanggung jawab ini sangat relevan mengingat ketidakakuratan data penerima baik yang disebabkan oleh manipulasi yang disengaja maupun oleh kelalaian dalam proses administrasi merupakan salah satu kendala struktural paling kronis yang berulang kali ditemukan dalam berbagai kajian implementasi bantuan sosial di Indonesia (Ajun et al., 2024). Dengan melibatkan masyarakat sebagai agen akuntabilitas sosial, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi individual, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan norma sosial yang mendorong kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan program bantuan pemerintah.

Peningkatan Kesadaran BLT Kesra untuk Kemandirian Ekonomi

Aspek yang paling membedakan sosialisasi ini dari sekadar penyampaian informasi teknis adalah upaya penanaman paradigma transformatif bahwa BLT Kesra merupakan langkah awal menuju kemandirian ekonomi, bukan tujuan akhir atau sumber pendapatan permanen yang dapat diandalkan selamanya. Penanaman paradigma ini merupakan salah satu dimensi paling menantang sekaligus paling penting dalam keseluruhan kegiatan sosialisasi, karena menyentuh aspek psikologis dan kultural yang jauh lebih dalam dari sekadar pemahaman teknis tentang mekanisme program.

Dalam konteks sosiologis, bantuan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang tanpa disertai upaya pemberdayaan yang sistematis berpotensi menciptakan kondisi yang oleh para ilmuwan sosial disebut sebagai "welfare dependency" atau ketergantungan pada kesejahteraan, di mana penerima manfaat secara tidak sadar kehilangan motivasi untuk mencari peningkatan kondisi ekonomi secara mandiri karena merasa cukup terlindungi oleh jaring pengaman sosial yang ada. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fenomena ketergantungan ini, apabila tidak ditangani secara proaktif melalui program pemberdayaan yang komprehensif, dapat menghambat mobilitas sosial-ekonomi penerima manfaat dan bahkan memperparah kondisi kemiskinan antargenerasi (Puryanti et al., 2022). Inilah mengapa perubahan paradigma dari mentalitas "penerima bantuan" menjadi "calon pelaku ekonomi mandiri" menjadi sangat krusial untuk ditanamkan dalam setiap sesi sosialisasi.

Dalam kegiatan sosialisasi di Kelurahan Seberang Palinggam, paradigma tersebut tidak disampaikan secara doktriner atau menggurui, melainkan dibangun melalui pendekatan dialogis yang memberdayakan. Fasilitator sosialisasi mengajak peserta untuk merefleksikan potensi-potensi yang mereka miliki baik dalam bentuk keterampilan, jaringan sosial, maupun sumber daya lokal yang dapat dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi. Contoh-contoh nyata dari keberhasilan warga komunitas serupa yang berhasil memanfaatkan bantuan pemerintah sebagai batu loncatan untuk mengembangkan usaha mandiri disampaikan untuk memberikan inspirasi dan membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar slogan, tetapi sebuah kemungkinan nyata yang dapat dicapai dengan kerja keras, kreativitas, dan dukungan yang tepat.

Pendekatan ini selaras dengan konsep *community empowerment* yang dikembangkan oleh berbagai teoritikus pemberdayaan masyarakat, yang secara konsisten menekankan bahwa program bantuan sosial yang efektif semestinya tidak hanya berperan sebagai penyangga ekonomi sesaat,



melainkan juga sebagai katalis yang memicu proses peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang (Kementerian Sosial RI, 2021). Pemerintah dalam hal ini memiliki peluang yang sangat strategis untuk mengintegrasikan BLT Kesra dengan program-program pemberdayaan yang lebih komprehensif dan terukur, seperti pelatihan keterampilan vokasional yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal, pendampingan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi akses terhadap permodalan usaha melalui skema kredit mikro yang terjangkau. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial merupakan salah satu contoh nyata dari upaya pemerintah untuk membangun jembatan yang menghubungkan bantuan tunai dengan pemberdayaan ekonomi produktif secara terintegrasi (Blog Amikom, 2026). Apabila program semacam ini dapat diperluas jangkauannya dan disesuaikan dengan konteks spesifik masing-masing wilayah, maka potensi dampak jangka panjang dari BLT Kesra akan jauh melampaui fungsi konsumsifnya yang bersifat sementara.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik dan secara umum mendapat respons yang positif dari masyarakat, sejumlah tantangan substantif yang perlu mendapat perhatian serius juga teridentifikasi selama dan setelah kegiatan berlangsung. Tantangan-tantangan ini tidak bersifat teknis semata, melainkan menyentuh aspek-aspek struktural yang lebih dalam dari sistem implementasi program bantuan sosial di Indonesia secara keseluruhan.

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah persoalan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat yang berkaitan erat dengan kualitas pemutakhiran data DTSEN di tingkat kelurahan. Data DTSEN yang digunakan sebagai basis penetapan penerima manfaat seringkali tidak mencerminkan kondisi terkini dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat, terutama di kelurahan-kelurahan yang mengalami perubahan sosio-ekonomi yang relatif cepat akibat berbagai faktor seperti migrasi penduduk, perubahan jenis pekerjaan, atau dampak bencana alam dan guncangan ekonomi. Apabila data tidak diperbarui secara berkala dan sistematis, maka risiko exclusion error di mana keluarga yang sesungguhnya layak menerima bantuan justru tidak terdaftar maupun inclusion error di mana keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat masih tercantum sebagai penerima akan tetap tinggi dan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Partisipasi aktif dan proaktif masyarakat dalam proses pendataan dan pemutakhiran data, dikombinasikan dengan komitmen aparat kelurahan untuk menjalankan verifikasi lapangan secara berkala dan transparan, menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi tantangan ini.

Tantangan kedua adalah sifat sosialisasi yang masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Pelaksanaan sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali pada awal program meskipun dilakukan dengan kualitas yang baik memiliki keterbatasan inheren dalam menghasilkan perubahan perilaku yang permanen dan mendalam, terutama dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Penelitian dalam bidang komunikasi dan perubahan perilaku secara konsisten menunjukkan bahwa satu kali paparan terhadap informasi baru, betapapun berkualitasnya, jarang cukup untuk mengubah pola perilaku yang telah lama tertanam. Perubahan perilaku yang berkelanjutan membutuhkan pengulangan pesan, pendampingan, dan dukungan sosial yang konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang (Kristanto et al., 2024). Tanpa mekanisme tindak lanjut yang terstruktur, terdapat risiko nyata bahwa pemahaman dan komitmen yang telah dibangun melalui sosialisasi akan



memudar seiring berjalannya waktu dan tidak berujung pada perubahan praktik pengelolaan keuangan yang diharapkan.

Berdasarkan identifikasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program BLT Kesra secara keseluruhan. Pertama, pemerintah kelurahan dan instansi terkait perlu menyelenggarakan sosialisasi secara berkala minimal pada setiap tahap penyaluran baru untuk memastikan pemahaman masyarakat terus diperbarui dan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dapat segera dijawab. Kedua, sosialisasi sebaiknya diintegrasikan secara organik dengan program-program pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha yang sudah ada, sehingga dampak BLT Kesra dapat melampaui fungsi konsumtifnya dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Ketiga, perlu dibangun mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk melalui platform digital yang sederhana dan ramah bagi pengguna awam untuk memperkuat akuntabilitas program dari sisi masyarakat. Keempat, pembaruan data DTSEN harus dilaksanakan secara rutin, sistematis, dan melibatkan partisipasi aktif warga melalui mekanisme verifikasi lapangan yang transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat, guna mengurangi secara signifikan potensi ketidaktepatan sasaran yang selama ini menjadi salah satu kelemahan struktural paling kritis dalam implementasi program bantuan sosial di Indonesia (Ajun et al., 2024; Hadi et al., 2025). Keempat rekomendasi ini bersifat saling melengkapi dan sebaiknya dilaksanakan secara simultan sebagai satu paket kebijakan yang kohesif, bukan sebagai langkah langkah yang terpisah dan parsial.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) di Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Program BLT Kesra merupakan bantuan tunai tanpa syarat sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan secara triwulanan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini berfungsi sebagai perlindungan ekonomi bagi masyarakat rentan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap. Sosialisasi yang dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat berhasil meningkatkan pemahaman warga



mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat BLT Kesra. Masyarakat juga memperoleh panduan dalam memanfaatkan bantuan secara tepat dan produktif, serta memahami bahwa BLT Kesra merupakan langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Selain itu, adanya ruang diskusi dua arah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pelaksana.

Respons masyarakat yang positif menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dialogis dan berbasis pemberdayaan lebih efektif dibandingkan sosialisasi yang bersifat satu arah. Namun, keberhasilan program dalam jangka panjang masih menghadapi tantangan, seperti pemutakhiran data DTSEN yang belum optimal, kurangnya pendampingan lanjutan, dan keterbatasan kapasitas aparat kelurahan dalam menangani pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilaksanakan secara berkala dan diintegrasikan dengan program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pembaruan data partisipatif, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Sinergi antara BLT Kesra dan program pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama program, yaitu membantu masyarakat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajun, A. S., Canon, S., & Payu, R. B. (2024). Analisis ketepatan sasaran penerima bantuan sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal EK&BI*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: BPS Statistics Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- BPS Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Profil Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat September 2024*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat. Diakses dari <https://sumbar.bps.go.id>
- Elviyanti. (2018). Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hadi, N., Anjasmari, N. M. M., & Noorrahman, M. F. (2025). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 82–104.
- Hastuti, E., et al. (2021). Efektivitas BLT dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 9(2), 45–62.
- Kambali, M., Nasrulloh, A., & Ulum, M. C. (2022). Efektivitas sosialisasi program bantuan langsung tunai dalam meningkatkan pemahaman masyarakat penerima manfaat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–125.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Laporan BLT dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Pemutakhiran Data Penerima Bansos 2024*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 239/HUK/2025 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemensos RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. (2024). Analisis implementasi program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan. *PESHUM*, 4(1).
- Puryanti, D., et al. (2022). Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–48.
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 2(5), 399–405.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.